

EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS PADA BUMD KARYA TRANSAD KAMPUNG BANDAR AGUNG)

Seodega¹, Bambang Suhada², Febriyanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, 34111, Indonesia

Email: Jokosus80@gmail.com¹

basucpc@gmail.com²

febriyanto0223027901@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kinerja BUMD Karya Transad Periode 2020-2022 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan form indikator kinerja kunci pelaksana operasional seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja BUMD Karya Transad Periode 2020-2022 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan form indikator kinerja kunci pelaksana operasional sangat kurang, bahkan 6 dari 12 sub indikator pada form tersebut tidak bisa di evaluasi.

Keyword: Evaluasi Kinerja BUMDes, Pendapatan Asli Kampung (PAD)

Abstract

This study aims to analyze the performance evaluation of Regional-Owned Enterprise (BUMD) Karya Transad for the 2020-2022 period in increasing the Original Local Government Revenue (PAD) in Bandar Agung village, Terusan Nunyai District, Lampung Tengah Regency. This study uses the form of key performance indicator for operational implementer as stated in the Regulation of the Minister of Village, Development Of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021. Based on the result of the study, it can be seen that the performance of BUMD Karya Transad for the 2020-2022 period in increasing the Original Local Government Revenue (PAD) in Bandar Agung village, Terusan Nunyai District, Lampung Tengah Regency, based on the form of key performance indicator for operational implementer is so low, even 6 out of 12 sub-indicators on the form cannot be evaluated.

Keyword: evaluation of Regional-Owned Enterprise (BUMD), Original Local Government Revenue (PAD)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai merupakan kampung bagian tengah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang

berdiri pada tanggal 22 Februari 1973 yang berasal dari 351 Kepala Keluarga Transmigrasi TNI – AD (TRANSAD) yang terdiri dari ; Kodam Brawijaya, Kodam Diponegoro, Kodam Siliwangi, Kodam Sri Wijaya dengan luas wilayah

pemukiman 1771 Ha. Saat ini Kampung Bandar Agung memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.228 jiwa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat kampung dibentuk agar menjadi tulang punggung yang menggerakkan roda perekonomian kampung guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Salah satu BUMD yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi kampung adalah BUMD Karya Transad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai yang didirikan pada Februari 2017 sesuai peraturan kampung nomor 02 tahun 2017 yang di perbaharui dengan peraturan Kampung nomor 02 tahun 2020. BUMD Karya Transad sebagai suatu lembaga komersial memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa sehingga BUMD juga berorientasi pada keuntungan (profit oriented) agar lembaga tersebut dapat bertahan hidup/survive dan berkembang serta mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan perbandingan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang dihasilkan BUMD Karya Transad Kampung Bandar Agung pada tahun 2020-2022, untuk hal ini dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja BUMD Karya Transad dalam tiga tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja BUMD Karya Transad untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

Sehingga peneliti melakukan riset dengan judul “Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada BUMD Karya Transad Kampung Bandar Agung)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi kinerja BUMD Karya Transad Periode 2020-2022 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah?

Kajian Literatur

Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi

dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besar imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Kemampuan kerja berhubungan dengan pengetahuan, bakat, minat dan pengalaman agar dapat menyelesaikan tugas tugas yang sesuai dengan pekerjaan yang didudukinya (Febriyanto : 2021).

Menurut Moeheriono (2012:95), kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Sedangkan menurut Rivai (2013:604), kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas darisuatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masalah yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Menurut Nico Finandi Asnawi dikutip dari Sucipto (2003) “Kinerja Keuangan merupakan suatu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan sesuai tujuan serta visi dan misinya dalam menghasilkan laba”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) ”Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Kinerja BUMDes

Menurut Muhammad Bhakti Syuhodo dikutip dari Wirawan (2012) Evaluasi merupakan persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika suatu program/gerakan telah selesai. Melalui penilaian ini sangat dapat dirasakan bagaimana kecukupan program/tindakan yang dilakukan sinkron dengan yang diinginkan dan jika tidak, dalam keadaan berhenti atau mengembangkannya lebih lanjut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama, ada beberapa aspek yang harus di evaluasi, yaitu : Keuangan dan pasar, fokus pelanggan, fokus efektifitas produk dan

proses, fokus tenaga kerja, kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan dan agen pembangunan.

Menurut Ari Kuncara Widagdo (2016) Suatu kebijakan baik yang dibuat dan dirumuskan secara baik, belum tentu dapat diimplementasikan sesuai rencana. Beberapa institusi atau lembaga kadang justru tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga perlu adanya evaluasi supaya dapat memberikan penilaian baik itu berupa usulan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak hasil kebijakan yang terjadi.

Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan memang dimaksudkan untuk melihat keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu kebijakan yang telah diimplementasikan terhadap kelompok sasaran yang dikenai kebijakan tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

Dalam buku panduan BUMD yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4). BUMD merupakan badan usaha milik kampung yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi kampung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa

pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. system tata pemerintahan desa yang baik berdasarkan hukum serta membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Merina Apriolensi dikutip dari Maryunani (2008) "BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa"

Menurut Neny Tri Indrianasari dikutip dari Gunawan (2013) Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang keuangan desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif mengelola keuangan desa tanpa adanya intervensi pemerintah di atasnya atau supra desa. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Permedagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Jika pengelolaan APBDes menggunakan asas tersebut maka akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governmance*) di desa.

Pendapatan Asli Desa

Dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 tahun 2013 tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Hasil musyawarah desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

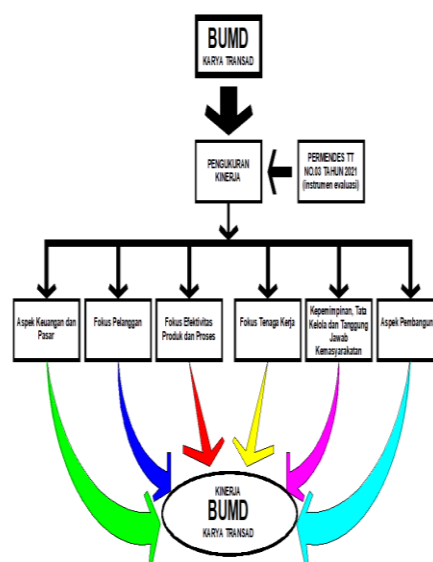
Pendapatan Kampung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 tahun anggaran yang

tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung. Pendapatan Kampung terdiri atas: Pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupaten, Alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan desa lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga .

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan kerekening Kampung, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah Kampung. Menurut Rosidin Utang (2019)

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini adalah

kuantitatif karena data yang dikumpulkan merupakan dalam bentuk angka-angka dari kinerja BUMDesa Karya Transad Bandar Agung dari tahun 2020-2022 dan penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara lapangan Menurut Sugiyono 2012), dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, sehingga menjadi tujuan penelitian ini ialah menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, terperinci, dan tuntas datanya. Menurut Gunawan Imam (2013) Penelitian kualitati bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi

Dalam hal ini peneliti menggunakan pengukuran berupa *Balanced Scorecard* Menurut Soni Yuwono (2008) *Balanced Scorecard* merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komperehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu persepektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui mekanisme sebab akibat (*cause and effect*), perspektif keuangan menjadi tolak ukur operasional pada tiga perspektif lainnya sebagai driver (*lead indicator*).

Tahapan Penelitian

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan kinerja BUMDesa Karya Transad Bandar Agung dari tahun 2020-2022.

b. Sampel

Dalam hal ini penelitian menggunakan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi BUMDesa Karya Transad Bandar Agung dari tahun 2020-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

BUMDes Karya Transad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai dibentuk pada tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Kampung No. 01 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Perkam No. 02 Tahun 2020. Unit usaha yang dijalankan saat ini meliputi: Unit Usaha Industri Kecil Isi ulang air mineral *Reverse Osmosis* (RO), Unit Usaha e-Samdes (elektronik Samsat Desa), Unit Usaha Pasar Kampung, Unit Usaha Maggot dan Unit Usaha Ruko & Pujasera. BUMDes Karya Transad memiliki visi mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera dan memiliki misi Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan

umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.

Hasil Analisis

PEMBAHASAN

Keuangan dan Pasar (Pertumbuhan pendapatan dan Produk Terjual dan Pertumbuhan Aset)

No	Tahun	Pendapatan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Unit usaha Isi ulang RO	Rp. 9.800.000.-	Rp. 9.870.000.-	Rp. 11.670.000.-
2	Unit usaha Pasar	Rp. 15.370.000.-	Rp. 117.115.000.-	Rp. 117.115.000.-
3	Unit E-Samdes	Belum ada	Rp. 490.250.-	Rp. 7.414.000.-
4	Unit usaha Pujasera	Belum ada	Belum ada	Rp. 11.950.000.-
5	Unit Usaha Magot	Belum ada	Belum ada	Rp. 4.080.000.-
	Total pendapatan kotor	Rp. 25.170.000	Rp. 127.475.250	Rp. 152.229.000
	Pengeluaran	Rp. 9.200.000	Rp. 9.250.000	Rp. 33.960.000
	Total pendapatan Bersih	Rp. 15.970.000	Rp. 118.225.250	Rp. 117.425.000

Berikut rumus untuk menghitung indikator kinerja nya :

$$\text{Keuangan dan Pasar} = \frac{\text{Penjualan tahun berjalan}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{117.425.000}{118.225.250} \times 100$$

$$= 99.32 \%$$

Fokus Pelanggan (loyalitas pelanggan dan meningkatkan pesanan)

Tabel 9. Fokus Pelanggan

No	Unit Usaha	Jumlah pelanggan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Unit usaha Isi ulang RO	1960 orang	1974 orang (1470 orang yang sama dengan tahun sebelumnya)	2334 orang (1780 orang sama dengan tahun sebelumnya)
2	Unit usaha Pasar	300 orang	300 orang (pemilik kios sama dengan pemilik kios tahun sebelumnya)	300 orang (pemilik kios sama dengan pemilik kios tahun sebelumnya)
3	Unit E-Samdes	Belum ada	Motor : 47 orang Mobil : 5 orang	Motor : 603 orang (47 orang adalah pelanggan tahun sebelumnya) Mobil : 35 orang (5 orang adalah pelanggan tahun sebelumnya)
4	Unit usaha Pujasera	Belum ada	Belum ada	30 orang
5	Unit Usaha Magot	Belum ada	Belum ada	2 kelompok

Berdasarkan tabel 9. Fokus pelanggan, pada unit usaha air isi ulang, jumlah pelanggan yang menggunakan unit usaha air ulang ini 100% kembali dan menggunakan air isi ulang milik BUMDes Karya Transad. Pada unit

usaha pasar jumlah pelanggan yang memakai/ menyewakan unit usaha pasar ini adalah 100% orang yang sama, karena system penyewaan dan pembayaran kios pasar pada unit usaha ini adalah penyewaan kios pasar selama jangka waktu 10 tahun. Pada unit usaha E-Samdes, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan E-Samdes pada tahun sebelumnya kembali menggunakan layanan E-Samdes di tahun selanjutnya (100%).

Pada unit usaha Pujasera dan unit usaha maggot, belum bias di teliti focus pelanggan nya karena 2 unit usaha ini baru berjalan pada bulan November 2022.

Fokus Efektivitas Produk dan Proses (investasi)

Pada BUMDes Karya Transad Kampung Bandar Agung tidak memiliki program investasi , sehingga pengujian pada Fokus efektivitas produk dan proses tidak bisa dilakukan.

Fokus Tenaga Kerja

Pada sub komponen ini, tidak ada data karyawan yang memperoleh sertifikasi sehingga tidak dapat di masukkan kedalam evaluasi kinerja BUMDes Karya Transad.

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat (Penyampaian laporan elektronik (portal BUMN dan indeks GCG)

Dari tahun 2020, 2021 sampai dengan tahun 2022 BUMDes Karya Transad hanya melaporkan keuangan BUMDesa kepada Kepala Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah secara manual. Laporan keuangan BUMDes Karya Transad terdiri dari laporan neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut disampaikan pada saat Musyawarah Kampung yang dihadiri juga oleh Badan Permusyawaratan Kampung.

Agen Pembangunan (Tenaga kerja Lokal dan TKDN Produk)

No	Unit Usaha	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Unit usaha Isi ulang RO			4/35 x 100% = 11,42%
2	Unit usaha Pasar			16/35 x 100% = 45,71%
3	Unit E-Samdes	-	-	3/35 x 100% = 8,57%
4	Unit usaha Pujasera&ruko	-	-	5/35 x 100% = 14,28%
5	Unit Usaha Magot	-	-	7/35 x 100% = 20%

Tenaga Kerja lokal untuk semua unit usaha BUMDesa Karya Transad Bandar Agung yang berjumlah total 35 tenaga kerja semuanya adalah tenaga kerja local yang berdomisili di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dan telah dijabarkan di atas maka penulis dapat menilai bahwa evaluasi kinerja BUMDes Karya Transad dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada Kampung Bandar Agung adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Sumber Daya Manusia

Dari jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk unit-unit usaha pada BUMDes Karya Transad, keseluruhannya merupakan warga lokal yang berdomisili di Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sayangnya SDM yang dimiliki bukan lah SDM yang handal dalam hal pembukuan dan pengolahan data anggaran, sehingga penulis sangat susah untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan untuk menyelesaikan tesis ini.

1. Perkembangan Unit usaha BUMDes.

▪ Uraian perkembangan usaha isi air ulang RO

Pada unit usaha isi ulang air RO, jumlah pendapatan meningkat sebesar 18,94% dari tahun 2021, juga terjadi kenaikan jumlah produk terjual sebanyak 18,23%. Selain itu juga terjadi penambahan aset usaha berupa kendaraan bentor roda 3 (1 unit) pada tahun 2021.

▪ Uraian perkembangan usaha pasar

Pada unit usaha pasar, tidak terjadi penambahan pendapatan maupun aset, di karenakan unit usaha ini adalah unit usaha penyewaan kios pasar di pasar Bandar Agung, dengan jumlah kios yang masih sama dan nilai sewa yang masih sama dengan tahun sebelumnya, maka tidak terjadi penambahan pendapatan maupun aset.

▪ Uraian perkembangan usaha E-Samdes

Unit usaha E-Samdes adalah kerjasama Kampung Bandar Agung

dengan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Lampung, yaitu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan dan PBB yang di mulai dari bulan Oktober tahun 2021. Pada tahun 2022 unit usaha E-Samdes mengalami peningkatan pendapatan dan transaksi kurang lebih 150 kali lipat di banding pendapatan dan transaksi tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah transaksi pada tahun 2022, juga berimbas pada meningkatnya aset (sarana dan prasarana) milik unit usaha.

- Uraian usaha Pujasera

Unit usaha Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) adalah unit usaha baru di tahun 2022 berupa penyewaan loss yang di peruntukkan untuk lokasi usaha kuliner di Bandar Agung. Dengan jumlah 30 loss yang disewakan pendapatan yang di hasilkan adalah Rp.11.950.000,-. Aset yang dimiliki adalah Loss Pujasera berukuran 30x15 m.

- Uraian usaha Budidaya Maggot

Unit usaha maggot adalah unit usaha baru ditahun 2022, yang merupakan program CSV (Creating Shared Value) antara PT.Great Giant Pineapple (GGP) dengan kampung Bandar Agung. Ditahun 2022 ini baru 2 kelompok sub usaha yang menjadi bagian dari unit usaha maggot. Unit usaha ini dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih 20 orang, unit usaha ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 4.080.000,- per tahun

2. Kondisi Keuangan.

Dalam pengelolaan program BUMDes Karya Transad belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dikarenakan kurangnya transparansi, akuntabel karena tidak adanya pembukuan dan pelaporan yang tersusun secara teknis dan sistematis sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai administrasi dan pengolahan data keuangan. Tidak adanya target kinerja BUMDes untuk tahun yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaan program BUMDes hanya dijalankan dan dikelola seadanya oleh pengurus karena kurangnya tenaga kerja (SDM) yang handal dalam bidang tersebut sehingga tidak adanya system pembukuan yang baik secara teknis. Juga tidak ada nya support dari pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi kinerja BUMDes Karya Transad.

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), pada tahun 2022 BUMDes Karya Transad berusaha mengambil peran dengan membuka unit-unit usaha baru yang lebih menghasilkan pemasukan untuk BUMDes dibandingkan dengan unit usaha sebelumnya. Walau pun mengalami kenaikan untuk proporsi kontribusi untuk PAD kampung, tetapi hal itu tidak sesuai dengan AD/ART yang sdh di sepakati, padahal tertera pembagian untuk PAD kampung adalah sebesar 15%.

Dalam pengelolaan BUMDes Karya Transad masalah yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam

mengelola program BUMDes Karya Transad, padahal SDM merupakan hal utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa program dan tidak adanya pembukuan yang baik secara teknis.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan dan analisis diatas dapat disimpulkan dan diberikan saran sebagai berikut :

1. Kinerja BUMDes Karya Transad dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada Kampung Bandar Agung belum memadai dilihat dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program BUMDes Karya Transad yang belum memenuhi beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya prinsip Transparansi dan sosialisasi serta prinsip profesionalisme yang dimiliki oleh pengurus BUMDes masih sangat kurang. Sehingga peran BUMDes Karya Transad sebagai instrumen penguat ekonomi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dampaknya secara ekonomi belum bisa dirasakan.
2. Kinerja BUMDes yang belum memadai tersebut tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mengelola BUMDes Karya Transad seperti kurangnya SDM yang handal dalam bidang ini, dan kurangnya sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Karya Transad dalam mengelola dan menjalankan tugas dan wewenangnya. Serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat desa akan keberadaan BUMDes tersebut.

3. Tidak adanya andil pihak Kecamatan atau Kabupaten dalam hal ini Dinas PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kabupaten Lampung Tengah dalam mengevaluasi kinerja BUMDes di Lampung Tengah, termasuk BUMDes Karya Transad Kampung Bandar Agung, sehingga pengelolaan BUMDes seperti berjalan apa adanya.

SARAN

Dari hasil kesimpulan penelitian mengenai Evaluasi Kinerja BUMD Karya Transad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Periode 2020-2022. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kampung
Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada Pemerintah Kampung agar lebih memperhatikan program BUMDes untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi kampung serta melihat dan menggali potensi-potensi yang ada dalam kampung untuk dikembangkan. Kemudian Pemerintah Kampung juga diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola BUMDes Karya Transad.
2. Pengurus BUMDes
Pengurus BUMDes, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program BUMDes yang telah dijalankan. Serta pengelola BUMDes Karya Transad diharapkan bisa lebih memperhatikan potensi masyarakat kampung dalam pengembangan usaha-usaha BUMDes sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Bagi pemerintah Kecamatan/ Kabupaten

Salah satu tugas pemerintah Kecamatan/Kabupaten adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa dengan melakukan pemeriksaan keuangan dan laporan secara berkala ke pihak BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Aprioliensi, Merina. (2021). "Analisis pemingkatan badan usaha milik kampung dengan metode topsis di kecamatan anak ratu aji kabupaten lampung tengah.". *SIMPLEX: Journal of Economic Management* 2.2, 47-59.

Ari Kuncara Widagdo, Widodo, Agus. 2016. Sistem Akuntansi Pengelola Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, XIX (2).

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).2007.Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.

Indrianasari, Neny. T. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1 (2), 29-46.

Linda, W. A., & Febriyanto, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Pt. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 1(4), 872-884.

Muhammad Bhakti Syuhodo, Bambang Suhada, Ichsan Dacholfany. 2020. Evaluasi pengelolaan dana desa pada kecamatan bangunrejo kabupaten lampung tengah(Studi Kasus Kampung Tanjungjaya Dan Kampung Sripindowo). *SIMPLEX: Journal of Economic Management*, 20.

Moetheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nico Finandi Asnawi, Bambang Suhada, Ichsan Dacholfany. 2021. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan*

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Simplex: Journal of Economic Management 2.1 (2021), 267-270.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Rosidin, Utang, 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono 2012c. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yuwono, Sony. 2008. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.